

Nomor : 45/HM.00.00/LA-01/08/2024

Tanggal : 9 Agustus 2024

## PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN 2024 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.

IKP terdiri atas 4 dimensi, 12 sub dimensi turunan, dan 61 indikator. Dimensi pertama adalah konteks sosial dan politik yang memiliki sub dimensi turunan berupa keamanan; otoritas penyelenggara pemilu; dan otoritas penyelenggara negara. Dimensi kedua adalah penyelenggara pemilu dengan sub dimensi berupa hak memilih; pelaksanaan kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; ajudikasi dan keberatan pemilu; dan pengawasan pemilu. Dimensi ketiga adalah kontestasi dengan sub dimensi hak dipilih; dan kampanye calon. Dimensi keempat adalah partisipasi pemilih; dan partisipasi kelompok masyarakat.

Dimensi dari penyusunan IKP Bawaslu Kabupaten Lampung Barat ini bersumber dari penginputan dari kerawanan yang terjadi pada saat Pemilihan Tahun 2017 dan Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu, perlu diwaspadainya tingkat Kerawanan Pemilihan 2024 tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu diketahui dimensi yang memiliki skor tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah. Berikut adalah tabel hasil identifikasi isu dan tahapan rawan pemilihan 2024.

**Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Pemilihan 2024**

NO	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
1	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	100	Kesalahan penghitungan perolehan suara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
2	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	11.86	Politik uang	Kampanye
3	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	5.77	Netralitas ASN	Kampanye

NO	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
4	Adanya putusan DKPP thd jajaran KPU/Bawaslu	1.25	Etik Penyelenggara	Kampanye
5	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	0.46	Pengguna Hak Pemilih	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
6	Adanya Kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan	0.15	Pemasangan iklan di Media Cetak	Kampanye
7	Adanya Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0.02	Pengguna Hak Pemilih	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
8	Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta	0.01	Lokasi kampanye	Kampanye

### Data Kerawanan Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH KEJADIAN	ISU	TAHAPAN
1	Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	1	Pengguna Hak Pemilih	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
2	Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap	2	Pengguna Hak Pemilih	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
3	Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	1	Politik Uang	Kampanye
4	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	1	Kesalahan penghitungan perolehan suara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
5	Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar	1	Surat suara pemungutan suara tertukar	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada	1	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	1	Pemilih fiktif dan pengkondisian pemilih	Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO	INDIKATOR	JUMLAH KEJADIAN	ISU	TAHAPAN
7	Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada	1	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Terhadap isu dan hasil identifikasi kerawanan diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyusun langkah antisipasi (pencegahan) sebagai berikut :

NO	POTENSI KERAWANAN	LANGKAH ANTISIPASI
<b>1. Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>		
	a. adanya Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu
	b. Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	2. Berkoordinasi dengan Disdukcapil, KPU, Pemerintah Daerah sesuai tingkatan
		3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU pada setiap Tahapan
		4. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif
		5. Melakukan Patroli Pengawasan
		6. Membuka posko aduan Masyarakat
<b>2. Tahapan Kampanye</b>		
	a. Adanya Kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai ketentuan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu
	b. Adanya pelanggaran lokasi kampanye oleh peserta	2. Membangun sinergitas dan koordinasi kelembagaan bersama stakeholders
	c. Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan lembaga/instansi terkait
	d. Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	4. Sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat
	e. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	5. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif
		6. Melakukan Patroli Pengawasan
		7. Membuka posko aduan Masyarakat

<b>3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>			
a. Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar	b. Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada,	c. Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada,	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu 2. Berkoordinasi dengan KPU sesuai tingkatan 3. Melakukan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat 4. Menyampaikan Imbauan kepada KPU sesuai tingkatan
<b>4. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara</b>			
a. Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi	b. Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada		1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kepada jajaran Pengawas Pemilu; 2. Berkoordinasi dengan KPU sesuai tingkatan 3. Menyampaikan Imbauan kepada KPU sesuai tingkatan

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Tamam Mulhadi**

*Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Barat (0856-5881-4463)*